

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),  
DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI  
KHUSUS (DAK) TERHADAP BELANJA MODAL  
PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana**



**Nurlaili Indah Sari  
NIM. B1033161080**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
PONTIANAK  
2023**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),  
DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI  
KHUSUS (DAK) TERHADAP BELANJA MODAL  
PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana**



**Nurlaili Indah Sari  
NIM. B1033161080**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
PONTIANAK  
2023**

## PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Nurlaili Indah Sari  
NIM : B1033161080  
Jurusan : Akuntansi  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan  
Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan gelar kesarjanaan di Universitas Tanjungpura.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 20 Juni 2023



Nurlaili Indah Sari

NIM.B1033161080

## **PERTANGGUNGJAWABAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurlaili Indah Sari  
Jurusan : Akuntansi  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik  
Tanggal Ujian : 19 Juni 2023  
Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD),  
Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana  
Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja  
Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi  
Kalimantan Barat.

Menyatakan bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, 20 Juni 2023

Nurlaili Indah Sari  
NIM.B1033161080

**LEMBAR YURIDIS**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN / KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Penanggung Jawab Yuridis

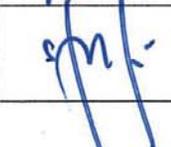


Nurlaili Indah Sari

NIM. B1033161080

Jurusan : Akuntansi  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik  
Tanggal Ujian Skripsi dan Komprehensif : 19 Juni 2023

Majelis Penguji

No	Majelis Penguji	Nama / NIP	Tanggal / Bulan / Tahun	Tanda Tangan
1	Pembimbing 1	Rusliyawati, SE, M.Si, Ak, CA NIP. 197901272002122002	22/6/2023	
2	Pembimbing 2	Angga P. Karpriana, SE, M.Acc NIP. 198611292014041000	21/6/2023	
3	Penguji 1	Khristina Yunita, S.E, M.Si, Ak., CA NIP. 197906182002122003	22/6/2023	
4	Penguji 2	Sari Rusmita, S.E., M.M. NIP. 198109162006042001	21/6/2023	

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus Dalam Ujian Skripsi dan Komprehensif

Pontianak, 21 Juni 2023

Ketua Program Studi Akuntansi



Khristina Yunita, SE, M.Si, Ak, CA.

NIP. 197906182002122003

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobbil Alamin*, segala puji bagi Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan kezaman yang terang benderang ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa dukungan, bimbingan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak baik material maupun non material. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada.

1. Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, Kesehatan, hidayah-Nya dan atas ijin-Nya serta ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan diberi kemudahan dan kelancaran sehingga hasilnya baik.
2. Kedua orang tua saya yaitu Ibu dan Bapak yang sangat saya sayangi, serta semua keluarga besar tercinta, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, materi maupun non materi, serta doa yang tiada henti-hentinya kepada peneliti.
3. Bapak Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si selaku Rektor Universitas Tanjungpura
4. Ibu Dr. Barkah, SE., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
5. Ibu Kristina Yunita, SE., M.Si., Ak,CA. sebagai ketua Program studi Akuntansi fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas Tanjungpura.
6. Ibu Rusliyawati, SE, M.Si, Ak, CA. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu disela kesibukannya untuk membimbing dan memotivasi serta kesempatannya kepada peneliti untuk mendiskusikan permasalahan permasalahan yang peneliti hadapi, sehingga skripsi ini dapat

terselesaikan.

7. Seluruh Dosen Akuntansi dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.

8. Serta semua pihak yang telah memberikan dukungan, doa dan motivasi. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Namun peneliti telah melakukan semampu dan semaksimal mungkin dalam pembuatan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kerendahan hati peneliti menerima saran dan kritik yang sifatnya konstruktif dari berbagai pihak. Akhirnya hanya kepada Allah Swt. peneliti memohon ridha dan maghfirah-Nya, semoga segala dukungan serta bantuan semua pihak mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Swt. dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan para pembaca.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pontianak ,19 Juni 2023

Penulis,

Nurlaili Indah Sari

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**Nurlaili Indah Sari**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

**ABSTRAK**

Alokasi anggaran pendapatan dan belanja pada APBD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021. Alokasi anggaran pendapatan pada APBD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022 mengalami kontraksi sebesar -16,19% (yoy) menjadi Rp 5.393 miliar. Besaran Belanja Daerah tergantung pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah. Selain Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdapat salah satu sumber penerimaan daerah adalah Dana Alokasi Umum (DAU) pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Selain DAU dana perimbangan yang lain adalah DAK, merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat memengaruhi belanja modal. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh berasal dari badan resmi yang diperoleh melalui informasi akurat (BPS Kalimantan Barat, 2022). Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, regresi data panel, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, uji parsial (uji t), uji simultan (uji f), dan uji koefisien determinasi ( $r^2$ ). Hasil penelitian ini menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),  
DANA AOKASI UMUM (DAU) DAN DANA ALOKASI  
KHUSUS (DAK) TERHADAP BELANJA MODAL  
PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT**

**RINGKASAN SKRIPSI**



**Nurlaili Indah Sari  
NIM. B1033161080**

**PPROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
PONTIANAK  
2023**

## **A. Latar belakang penelitian**

Otonomi daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Susanti dan Fahlevi (2016) otonomi Daerah merupakan suatu langkah awal menuju pembangunan ekonomi nasional yang lebih berdaya tumbuh tinggi yaitu dengan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat di daerah. Sedangkan desentralisasi fiskal sendiri adalah pemberian wewenangan kepada Daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintah yang lebih tinggi, dan menentukan belanja rutin dan investasi.

Pendapatan asli daerah yang dimiliki oleh wilayah Kalimantan Barat yang pada dasarnya bersumber dari beberapa aspek mulai dari perpajakan hingga pada pengelolaan potensial kekayaan yang dimiliki oleh daerah. Apabila dikaji secara mendalam maka pada dasarnya implikasi pendapatan daerah yang dimiliki oleh provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2017 hingga 2021 pendapatan asli daerah dengan penerimaan paling besar bersumber dari penghasilan pajak. Sedangkan untuk penghasilan yang bersumber dari retribusi daerah mengalami naik turun. Dengan dinamika besaran pendapatan asli daerah yang dimiliki oleh provinsi Kalimantan Barat yang mengalami terus peningkatan menjadikan wilayah tersebut tentunya semakin berkembang (Sari Rusmit 2016).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh sumber-sumber pendapatan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kalimantan Barat terhadap Belanja Modal pemerintah daerah. Sumber-sumber pendapatan daerah yang dimaksud adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus(DAK). Sehubungan dengan hal tersebut penulis memberi judul penelitian ini “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal di Kabupaten / Kota Provinsi Kalimantan Barat”

## **B. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut, tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten /Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

## **C. Metode Penelitian**

### **a. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan data Sekunder

### **b. Populasi dan sampel**

Populasi dalam penelitian ini menggunakan metode sampling jenuh yang mana seluruh populasi penelitian dijadikan sample dengan kurun waktu 5 tahun laporan keuangan terbaru.

### **c. Lokasi penelitian**

Penelitian dilakukan di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

### **d. Teknik pengambilan sampel**

Teknik pengambilan sampel yang dilakukan pada penelitian ini berupa data sekunder berupa laporan realisasi APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat yang bersumber dari laporan Statistik Keuangan pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Barat.

### **e. Teknik analisis data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sampling jenuh dengan menggunakan E-views versi 8 untuk menguji pengaruh pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal.

SPSS adalah metode analisis yang digunakan untuk melakukan analisis statistic dan ekonometri pada data berjenis runtun waktu. Dalam penelitian analisis data yang dilakukan terdiri dari analisis statistik deskriptif untuk mengetahui hubungan lansung maupun tidak langsung dari variabel bebas dan variabel terikat yang diteliti.

#### **D. Hasil Penelitian**

##### **1. Hipotesis 1**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menunjukkan hasil yang tidak signifikan karena adanya peningkata Pendapatan Asli Daerah tidak di ikuti dengan Peningkatan Belanja Modal. Artinya semakin tinggi atau rendah pendapatan asli daerah maka belanja modal tidak berpengaruh apapun.

##### **2. Hipotesis 2**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Koefisien DAU 1.164725 dapat di interprestasikan apabila DAU sebesar 1 juta maka akan meningkat belanja modal sebesar 1.164725 juta rupiah. Dana alokasi umum berasal dari dana APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan. Artinya semakin tinggi dana alokasi umum maka belanja modal juga akan semakin meningkat.

##### **3. Hipotesis 3**

Dari hasil pengujian ini diketahui bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Koefisien DAK 0.379212 juta rupiah. Artinya apabila terjadi peningkatan atau penurunan yang terjadi pada dana alokasi khusus maka akan berdampak pada belanja modal. Berpengaruhnya hubungan antara dana alokasi khusus terhadap belanja modal dijelaskan bahwa dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

### **E. Implikasi dari Hasil Uji Hipotesis**

Dalam keseluruhan, hasil uji hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa Bagi pemerintah pusat sebaiknya memberikan program yang lebih banyak kepada pemerinta daerah agar dapat memajukan pemerintah daerah sehingga anggaran belanja modal dapat bertambah. Bagi pemerintah daerah sebaiknya daoat membelanjakan anggaran dari pemerintahan pusat sebaik mungkin guna memajukan pemerintah daerah dan berdampak dalam mensejahterakan masyarakat yang ada di daerah.

### **F. Kesimpulan**

Pertama, Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Artinya semakin tinggi atau rendah pendapat asli daerah maka belanja modal tidak akan berdampak apapun

Kedua, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Artinya semakin tibggi dana alokasi umum maka belanja modal juga akan semakin meningkat dan sebaliknya.

Ketiga, Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Artinya semakin tinngi dana aoksi khusus maka belanja modal juga akan semakin meningkat dan sebaliknya.

Keempat Secara simultan terdapat pengaruh antar pendapatan asli daerah, dana alokasi umum,dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERTANGGUNGJAWABAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR YURIDIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>RINGKASAN SKRIPSI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Kontribusi Penelitian .....	6
1.4.1 Kontribusi Teoritis.....	6
1.4.2 Kontribusi Praktis.....	7
<b>BAB 2 TELAAH PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Belanja Modal.....	8
2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	13
2.1.3 Dana Alokasi Umum.....	18
2.1.4 Dana Alokasi Khusus .....	19
2.2 Kajian Empiris .....	24
2.2.1 Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian .....	30
2.3 Hipotesis Penelitian .....	31

<b>BAB 3 METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
3.1 Bentuk Penelitian .....	34
3.2 Data .....	34
3.3 Populasi dan Sampel.....	34
3.4 Variabel Penelitian.....	34
3.4.1 Variabel Independen.....	35
3.4.2 Variabel Dependen .....	36
3.4.3 Operasionalisasi Variabel.....	37
3.5 Metode Analisis .....	39
3.5.1 Statistik Deskriptif.....	39
3.5.2 Persamaan Regresi Linier Berganda .....	39
3.5.3 Uji Asumsi Klasik.....	39
3.5.4 Uji Hipotesis.....	41
<b>BAB 4 HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
4.1 Bentuk Penelitian .....	44
4.1.1 Analilis Deskriptif .....	44
4.1.2 Regresi Data Panel.....	46
4.1.3 Uji Asumsi Klasik.....	48
4.1.4 Pengujian Hipotesis .....	51
4.2 Pembahasan .....	54
4.2.1 Hasil Pengujian Hipotesis .....	54
4.2.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal ..	55
4.2.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal.....	56
4.2.4 Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal .....	57
4.2.5 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal..	59
<b>BAB 5 KESIMPULAN DAN IMPLIKASI .....</b>	<b>61</b>
5.1 KESIMPULAN.....	61
5.2 IMPLIKASI.....	61

5.3 KETERBATASA PENELITIAN.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>68</b>

## DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 Kajian Empiris.....	23
TABEL 3.1 Operasionalisasi Variabel.....	34
TABEL 4.1 Statistik Deskriptif.....	41
TABEL 4.2 Model Estimasi.....	43
TABEL 4.3 Hasil Uji Chow.....	44
TABEL 4.4 Hasil Uji Hausman .....	45
TABEL 4.5 Hasil Uji Autokorelasi.....	49
TABEL 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas.....	47
TABEL 4.7 Hasil Uji Glejser.....	48
TABEL 4.8 Hasil Uji Parsial (Uji T ) .....	49
TABEL 4.9 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis.....	55

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1	Pendapatan dan Belanja Daerah Kalimantan Barat Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah di Provinsi..	3
GAMBAR 1.2	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021-2022 .....	4
GAMBAR 1.3	Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 dan .....	5
GAMBAR 2.1.1	Kerangka Konseptual .....	28
GAMBAR 4.1	Hasil Uji Normalitas .....	46

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Susanti dan Fahlevi (2016) otonomi Daerah merupakan suatu langkah awal menuju pembangunan ekonomi nasional yang lebih berdaya tumbuh tinggi yaitu dengan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat di daerah. Sedangkan desentralisasi fiskal sendiri adalah pemberian wewenang kepada Daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintah yang lebih tinggi, dan menentukan belanja rutin dan investasi.

Kebijakan otonomi daerah dicanangkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Selain itu juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004. Dalam undang-undang tersebut diamanatkan bahwa suatu daerah diberikan kewenangan otonomi agar melaksanakan pembangunan di segala bidang dan diharapkan dilaksanakan secara mandiri oleh daerah, baik dari segi perencanaan, pembangunan, serta pembiayaannya. Kewenangan tersebut bertujuan untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, dan memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Menurut Mahmudi (2010) Belanja daerah dipisahkan dua bentuk yang terbagi atas Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi yang hakekatnya merupakan biaya (*expense*) untuk membiayai kegiatan non investasi yang memiliki kegunaan kurun waktu kurang dari 1 tahun, berbeda halnya dengan Belanja Modal yang pengertiannya merupakan belanja investasi berupa biaya sehingga diakui neraca. Manajemen belanja daerah harus menjadi fokus pemerintah daerah agar optimalisasi manajemen keuangan daerah dapat tercapai (Mahmudi, 2010).

Belanja Daerah yang termasuk belanja modal diperhitungkan karena berkaitan dengan keberlangsungan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. Belanja Modal dalam pemahamannya berhubungan dengan upaya pemerintah untuk menyediakan fasilitas agar menunjang kinerja pemerintah dalam upaya memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat. Menurut Halim (2014:229) Belanja Modal yaitu salah satu kelompok dari belanja daerah yang digunakan dalam pembelian dan penyediaan barang berwujud memiliki daya guna satu tahun lebih yang dipergunakan dalam pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas publik.

Ulum (2008) menjelaskan bahwa pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menambah aset tetap yang didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana maupun prasarana baik untuk kelancaran tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah meningkatkan alokasi untuk Belanja Modal dengan cara meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah yang mempengaruhi pemerintah daerah dalam mengalokasikan Belanja Modal.

Sumber-sumber yang mempengaruhi Belanja Modal adalah besar kecilnya pendapatan daerah. Menurut UU No. 23 Tahun 2004 pasal 157 pendapatan daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Disamping itu untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat juga menransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Kedua dasar hukum tersebut menegaskan bahwa pengalokasian Belanja Modal untuk kelancaran tugas pemerintah daerah ataupun untuk kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh sumber-sumber pendapatan daerah.

Pemerintah Pusat diharapkan agar digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Terkait pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang berdampak kepada besar atau kecilnya belanja modal yang ada di Indonesia. Peneliti

lebih memfokuskan ke salah satu provinsi di Indonesia yaitu provinsi Kalimantan Barat. Provinsi Kalimantan Barat pada dasarnya implikasi APBD pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021. Terjadinya penurunan anggaran ini tentu saja dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti anggaran pendapatan dan belanja pada APBD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021. Hal ini dapat dilihat pada table berikut.

**GAMBAR 1. 1**

**Pendapatan dan Belanja Daerah Kalimantan Barat Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Barat**



Sumber: BKAD Provinsi Kalbar 2022

Berdasarkan gambar 1.1 maka dapat dilihat terkait dengan perkembangan APBD dari tahun ke tahun yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kalimantan Barat. Apabila dikaji secara mendalam dapat dilihat pada tahun 2022 pendapatan asli daerah di wilayah ini mengalami penurunan hingga -6,74%. Secara lebih rinci pendapatan asli daerah pada tahun 2021 berada di angka Rp. 2.865,96 miliar sedangkan pada tahun 2022 nilai PAD menurun hingga berada di angka Rp. 2.672,83 miliar. Selain itu, dalam kajian yang lebih mendalam aspek dana perimbangan juga mengalami penurunan. Pada tahun 2021 dana perimbangan yang ada di wilayah Kalimantan Barat mencapai Rp. 3.794,12 miliar sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi Rp. 2.655,22 miliar. Kemudian untuk memudahkan pemahaman tersebut maka berikut data yang berkenaan dengan pelaksanaan atau realisasi APBD yang digunakan oleh pemerintah daerah provinsi

Kalimantan Barat pada periode tahun 2021-2022. Terkait anggaran dan realisasi pendapatan asli daerah provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada table berikut.

**GAMBAR 1.2**

**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat  
Tahun 2021-2022**

Uraian Pos APBD	Pagu		Realisasi s.d. Tw I		% Realisasi Tw I		% Perubahan	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	APBD	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah	2.865,96	2.672,83	478,13	604,80	16,68	22,63	(6,74)	26,49
- Pajak Daerah	2.206,65	2.343,27	351,57	468,12	15,93	19,98	6,19	33,15
- Retribusi Daerah	41,26	13,45	4,67	2,94	11,33	21,82	(67,40)	(37,21)
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	93,39	96,37	95,35	100,61	102,10	104,40	3,19	5,52
- Lain-Lain PAD Yang Sah	524,65	219,74	26,55	33,14	5,06	15,08	(58,12)	24,84
Dana Perimbangan	3.794,12	2.655,22	539,33	541,32	14,21	20,39	(30,02)	0,37
- Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	232,08	205,26	83,46	12,83	35,96	6,25	(11,56)	(84,63)
- Dana Alokasi Umum	1.624,27	1.572,24	406,07	524,08	25,00	33,33	(3,20)	29,06
- Dana Alokasi Khusus	1.937,76	877,72	49,80	4,41	2,57	0,50	(54,70)	(91,14)
Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	16,64	5,50	-	-	-	-	(66,96)	-
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	3,78	59,38	-	-	-	-	1.471,76	-
- Hibah	3,78	59,38	-	-	-	-	1.471,73	-
- Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
- Bantuan Keuangan dari Kab/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Pendapatan Daerah</b>	<b>6.680,49</b>	<b>5.392,93</b>	<b>1.017,46</b>	<b>1.146,13</b>	<b>15,23</b>	<b>21,25</b>	<b>(19,27)</b>	<b>12,65</b>

Sumber: BKAD provinsi Kalbar 2022

Berdasarkan gambar 1.2 dalam pengaplikasiannya pada tahun 2022 tepatnya perolehan pajak mencapai Rp. 468,12 miliar. Sedangkan dalam aspek hasil pengelolaan kekayaan daerah juga mengalami peningkatan hingga mencapai Rp.100,62 miliar. Sedangkan dari sudut pandang pendapatan asli daerah juga mengalami peningkatan hingga mencapai Rp. 33,14 miliar. Restribusi daerah yang diperoleh provinsi Kalimantan Barat mengalami penurunan pada tahun 2022 hingga mencapai Rp. 2,94 miliar. Namun dalam data di atas dapat dilihat bahwasannya jumlah APBD yang dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2022 mengalami penurunan yang berada di angka RP. 5,648,41 miliar sedangkan pada tahun 2021 jumlah APBD berada di kisaran angka Rp. 6.133,69 miliar. Tentunya penurunan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling memengaruhi satu dengan yang lainnya. Kemudian berdasarkan pendapatan asli daerah di provinsi Kalimantan Barat tentunya akan berdampak pada belanja modal di provinsi Kalimantan Barat. Besarnya belanja daerah di provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada table berikut.

**GAMBAR 1.3*****Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 dan 2022***

Uraian Pos APBD	Pagu		Realisasi s.d. Tw I		% Realisasi Tw I		% Perubahan	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	APBD	Realisasi
Belanja	6.000,45	4.532,38	305,16	251,59	5,09	5,55	(24,47)	(17,55)
- Belanja Pegawai	1.774,16	1.630,96	215,00	183,55	12,12	11,25	(8,07)	(14,62)
- Belanja Barang	2.092,84	1.728,84	90,01	62,37	4,30	3,61	(17,39)	(30,71)
- Hibah	224,38	249,33	-	3,39	-	1,36	11,12	-
- Bantuan Sosial	5,73	7,59	-	0,14	-	1,88	32,56	-
- Belanja Modal	99,66	885,66	0,16	2,14	-	0,24	788,68	-
- Belanja Tidak Terduga	1.670,43	30,00	-	-	0,01	-	(98,20)	(100,00)
Transfer	133,24	1.152,03	-	-	-	-	764,60	-
- Bagi Hasil Pajak	1.035,04	1.089,64	-	-	-	-	5,27	-
- Bantuan Keuangan	1.035,04	62,40	-	-	-	-	(93,97)	-
<b>Total Belanja Daerah</b>	<b>6.133,69</b>	<b>5.684,41</b>	<b>305,16</b>	<b>251,59</b>	<b>4,98</b>	<b>4,43</b>	<b>(7,32)</b>	<b>(17,55)</b>

Sumber: BKAD Daerah Provinsi Kalbar 2022

Berdasarkan gambar 1.3 dapat dilihat secara mendalam terkait dengan belanja atau pengeluaran yang digunakan pada tahun 2022. Pengeluaran yang dilakukan pada tahun 2022 belanja yang dimiliki oleh belanja pegawai, belanja barang, hibah, dan lain sebagainya. Besar atau kecilnya belanja daerah di provinsi Kalimantan Barat tentunya banyak faktor yang melatar belakangi hal tersebut salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan asli daerah yang dimiliki oleh wilayah Kalimantan Barat yang pada dasarnya bersumber dari beberapa aspek mulai dari perpajakan hingga pada pengelolaan potensial kekayaan yang dimiliki oleh daerah. Apabila dikaji secara mendalam maka pada dasarnya implikasi pendapatan daerah yang dimiliki oleh provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2017 hingga 2021 pendapatan asli daerah dengan penerimaan paling besar bersumber dari penghasilan pajak. Sedangkan untuk penghasilan yang bersumber dari retribusi daerah mengalami naik turun. Dengan dinamika besaran pendapatan asli daerah yang dimiliki oleh provinsi Kalimantan Barat yang mengalami terus peningkatan menjadikan wilayah tersebut tentunya semakin berkembang (Sari Rusmit 2016).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh sumber-sumber

pendapatan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kalimantan Barat terhadap Belanja Modal pemerintah daerah. Sumber-sumber pendapatan daerah yang dimaksud adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sehubungan dengan hal tersebut penulis memberi judul penelitian ini “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal di Kabupaten / Kota Provinsi Kalimantan Barat”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dan didasari oleh penelitian terdahulu terdapat berbagai hal yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat ?
2. Bagaimana Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat ?
3. Bagaimana Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di provinsi Kalimantan Barat ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Kalimantan Barat.

## **1.4 Kontribusi Penelitian**

### **1.4.1 Kontribusi Teoritis**

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah sebagai bahan dalam mempelajari pengalokasian sumber-sumber yang mempengaruhi Belanja Modal yaitu pendapatan

daerah secara produktif oleh pemerintah daerah. Selain itu juga untuk memperdalam mengenai materi organisasi sektor publik yaitu pemerintah daerah yang diperoleh di bangku kuliah.

#### **1.4.2 Kontribusi Praktis**

Peneliti berharap penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak-pihak di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti Sendiri

Sebagai penerapan ilmu yang selama ini telah diperoleh selama perkuliahan dan sebagai syarat untuk menyelesaikan jenjang pendidikan strata satu.

2. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran dan acuan bagaimana seharusnya Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat mengalokasikan sumber-sumber pendapatan daerah secara lebih produktif. Pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan cenderung meningkatkan persentase alokasi Belanja Modal.

3. Bagi pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan informasi bagi semua pihak yang tertarik dengan masalah-masalah yang dibahas pada penelitian ini